

PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA: AKANKAH MENGEKSKLUSI MASYARAKAT LOKAL (LAGI)?

Sukapti¹, Martinus Nanang²

¹Universitas Mulawarman
sukaptiregis@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan tulisan ini adalah melihat proses pembangunan IKN yang dapat (berpotensi) mengeksklusi masyarakat atau komunitas lokal dari ruang hidupnya. Argumen teoritis yang mendasari kajian ini adalah rencana-rencana pembangunan yang telah disusun sering kali tidak bisa dijalankan dalam praktiknya, sehingga menciptakan trajektori berbeda. Kajian awal dengan pendekatan kualitatif ini didasarkan pada informasi atau data dari literatur dan berita di berbagai media terkait dengan proses pemindahan IKN dan hasil-hasil kajian sebelumnya tentang model pembangunan di Kaltim. Kajian ini melihat bahwa proses pembangunan IKN yang baru dilakukan pada tahap awal saat ini masih mereproduksi pembangunanisme masa Orba. Prosesnya bersifat top down dengan inisiasi dan konsep dari pusat, mengabaikan prinsip FPIC sehingga masyarakat tidak memiliki pemahaman dan memberikan persetujuan secara bebas. Selain itu, prioritasnya pada pembangunan infrastruktur, sedangkan konsep pembangunan sosial belum diperhatikan. Penetapan kawasan untuk IKN di wilayah hutan produksi tetap berpotensi mengurangi ruang hidup masyarakat lokal. Skema/konsep untuk menjamin ruang hidup (tanah) bagi masyarakat lokal pun tidak mudah dibuat, karena belum teridentifikasinya masyarakat/komunitas lokal itu sendiri dan melonjaknya komodifikasi tanah. Dalam kondisi seperti itu, proses eksklusi tidak hanya terjadi pada kelompok sosial tertentu, tetapi menyasar individu dari semua kelompok/etnis, baik etnis lokal maupun pendatang. Perlu ada konsep rekayasa atau strategi kebudayaan yang menghasilkan proses sosial yang menginklusi semua elemen sehingga menjadi landasan kuat bagi pencapaian tujuan.

Kata kunci: *Pembangunanisme; IKN; inklusi-eksklusi; ruang hidup; Kaltim*

1. PENDAHULUAN

Program-program pembangunan skala besar di wilayah Kalimantan Timur telah dilakukan dari era Orde baru hingga saat ini. Dilihat secara historis, Kaltim menjadi sasaran modernisasi dan pembangunan ekonomi tiada henti yang diinisiasi oleh pemerintah pusat dengan mengandalkan eksploitasi sumber daya alam. Wilayah ini diklaim kaya akan SDA dan selalu dinarasikan memiliki tanah “kosong” yang luas. Wilayah Kaltim dibagi-bagi ke dalam zona-zona/ area tertentu, berdasar pemanfaatan sekaligus ditentukan pihak yang boleh memanfaatkannya, yang oleh Vandergeest dan Peluso disebut teritorialisasi (Li, 2002). Kebijakan seperti itu banyak dilakukan oleh negara modern. Pembagian wilayah menjadi area transmigrasi, HPH, HTI, HGU tambang batubara, dan sekarang area IKN merupakan wujud

teritorialisasi, yang secara langsung berdampak pada berkurangnya ruang hidup, baik untuk pemukiman dan mencari sumber penghidupan bagi masyarakat lokal.

Lokasi IKN Nusantara sudah diputuskan berada di Kabupaten PPU Kalimantan Timur seperti tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2022. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagai aturan turunan dari kebijakan tersebut sudah dan sedang dirampungkan. Geliat aktifitas pembangunan infrastruktur di seputar lokasi Ibu Kota Negara Nusantara sudah dilakukan sebelum UU disahkan. Rencananya, Ibu Kota Nusantara akan menjadi pusat pelayanan publik, dan puluhan ribu ASN segera didatangkan sebelum 2024 berakhir. Kendati lahan tersebut dikatakan wilayah konsesi HTI yang tidak ada penduduknya, komunitas/ masyarakat di lingkungan/zona sekitar IKN pasti akan terdampak.

Li (2012) mengatakan bahwa kehendak untuk memperbaiki (*the will to improve*) atau 'pembangunan' seringkali mengalami kesenjangan antara apa yang sudah dirancang dengan hasil akhirnya. Proses sosial di lapangan yang kompleks mengarahkan pada trajektori lain yang berbeda dari rencana yg telah disiapkan. Kajian ini akan mendiskusikan bagaimana proses pembangunan IKN dalam praktiknya berpotensi mengeksklusi masyarakat setempat, seperti terjadi pada program-program pembangunan ekonomi di era sebelumnya. Tulisan ini dibagi dalam empat bagian. Pertama, pendahuluan yang mengantarkan pada inti diskusi. Kedua, terpilihnya Kaltim dan inklusi masyarakat lokal. Ketiga, model pembangunan dan kekuatan eksklusi. Keempat, kesimpulan.

2. METODE

Kajian kualitatif ini dipilih untuk menjelaskan isu dan fenomena yang berkembang seputar pembangunan/ pemindahan IKN, khususnya tentang kuasa pembangunan yang dapat mengeksklusi masyarakat sekitar. Kajian ini didasarkan pada informasi atau data dari literatur dan berita di berbagai media massa elektronik terkait dengan proses pemindahan IKN dan hasil-hasil kajian sebelumnya tentang model pembangunan di Kaltim.

3. TEMUAN STUDI DAN DISKUSI

3.1. Memilih Kaltim, Menginklusi Masyarakat Kaltim dalam Pembangunan IKN

Sejak awal digulirkan keputusan pemindahan IKN pada tahun 2019 di berbagai media, Kalimantan Timur disebut-sebut menjadi salah satu kandidat calon lokasi IKN, hingga akhirnya benar terpilih lokasinya di wilayah administrative PPU dan Kutai Kartanegara. Kriteria yang membuat Kaltim terpilih adalah: (1). Memiliki lahan yang luas milik pemerintah atau BUMN. (2). Lokasi secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia. (3). Memiliki potensi konflik yang rendah, memiliki budaya terbuka pada pendatang. (4). Memiliki daya dukung tanah dan air untuk kebutuhan penduduk. (5). Memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan didukung oleh Tri Matra darat laut dan udara. (6). Lokasi aman, karena kemungkinan bencana alam seperti gempa rendah. (7). Memiliki aksesibilitas pada lokasi yang tinggi karena di antara dua kota, Balikpapan dan Samarinda. (Kementerian PPN/Bappenas, 2022). Karakteristik sosial masyarakat Kaltim turut menentukan pemilihan tersebut.

Terpilihnya Kaltim dapat (harus) dimaknai bahwa masyarakat/komunitas setempat yang berada di sekitar zona IKN menjadi bagian tak terpisahkan (tergabung) dalam proses pembangunan yang akan dijalankan. Mereka akan menjadi pihak paling terdampak langsung dari semua proses, karena mereka berada di zona terdekat. Banyak kasus program yang

dirancang dengan baik, tetapi hasilnya berbalik arah dan menjauh dari tujuannya. Menjadi penting melihat bagaimana masyarakat setempat dibentuk oleh negara sebagai subyek atau pihak yang akan dilibatkan/diikutkan dalam keseluruhan proses pencapaian tujuan pemindahan IKN.

Identifikasi dan pemetaan masyarakat seputar IKN menjadi penting dilakukan jika masyarakat lokal akan dijadikan subyek utama sejak awal. Bagaimana masyarakat lokal sebagai subyek dikonstruksi dalam mencapai kesejahteraan melalui rancangan pembangunan IKN?. Relasi antara masyarakat lokal dengan negara seperti apa yang diciptakan?. Disebutkan dalam rancangan IKN bahwa pemindahan IKN bertujuan merealisasikan visi Indonesia 2045, mendorong transformasi pembangunan sosial, budaya, ekonomi bangsa, serta mendorong pembangunan KTI melalui pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif.

Namun apakah saat ini mereka sudah teridentifikasi dan direkognisi?. Siapa atau darimana saja masyarakat/komunitas tersebut?. Jumlahnya berapa?. Bagaimana sejarah pemukiman komunitas terbentuk?. Berada dimana pemukiman mereka dalam zona-zona IKN?. Bagaimana pandangan dan pemahaman mereka terhadap pemindahan dan rancangan IKN?. Beberapa informasi menyebutkan keberadaan masyarakat etnis Paser dan transmigran Jawa di seputar IKN. Sejauh ini, belum ada informasi yang utuh dan memadai tentang mereka.

Kajian tentang pembangunan ekonomi melalui perkebunan sawit, pertambangan, pengelolaan hutan di Kaltim menempatkan masyarakat lokal sebagai subyek yang berperan menjadi penyuplai tenaga kerja murah. Suatu *adverse incorporation* sangat mungkin terjadi, dimana masyarakat setempat terinklusi dalam program kesejahteraan melalui IKN, namun tidak mampu mengakses manfaat yang memadai.

3.2. Pembangunanisme dan Proses Eksklusi

Proses pembangunan IKN belum lama dimulai atau masih pada tahap awal, namun proses awal tersebut telah mampu menunjukkan lintasannya (trajektori) seperti apa. Beberapa hal yang terlihat sebagai berikut. (a) Gagasan dan inisiatif pemindahan dan pemilihan lokasi IKN berasal dari pemerintah pusat, dalam arti berasal dari pihak luar masyarakat Kaltim. Kajian awal dilakukan oleh para ahli dijadikan sebagai dasar penentuan lokasi. (b) Sejauh ini tidak ada informasi yang menyebutkan bahwa prinsip FPIC dijalankan dengan baik. Beberapa informasi di media massa memperlihatkan bahwa beberapa komunitas lokal sekitar lokasi IKN tidak memiliki informasi dan pemahaman yang cukup tentang rencana IKN. Dalam sebuah wawancara, bupati PPU pun tidak memiliki informasi dan pemahaman yang jelas tentang batas-batas area IKN. Demikian juga masyarakat setempat mengalami kebingungan. (c) Memprioritaskan pembangunan infrastruktur, daripada pembangunan sosial. Pembangunan fisik/infrastruktur untuk mendukung IKN telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir, sedangkan pembangunan sosial untuk menciptakan kualitas kehidupan manusia belum dilakukan. Perlu ada konsep rekayasa atau strategi kebudayaan yang menghasilkan proses sosial yang menginklusi semua elemen sehingga menjadi landasan kuat bagi pencapaian tujuan.

Pada umumnya masyarakat Kaltim mendukung dan menaruh harapan besar pada mega proyek IKN, dengan tidak menutup mata pada pihak yang menolak. Harapan masyarakat Kaltim pada umumnya terkait dua hal. Pertama, perubahan kota/ wilayah menjadi maju dan modern. Selama ini infrastruktur dan layanan kehidupan lainnya tertinggal dari wilayah kota. Kedua, peningkatan kesejahteraan dengan tersedianya lapangan pekerjaan baru. Namun, harapan tersebut tetap dibayang-bayangi dengan dampak negatif yang lebih besar atau ketidakmampuan mengakses peluang yang ada.

Faktanya saat ini, proses eksklusi telah terjadi. Kekuatan eksklusi terbesar adalah komodifikasi tanah, selain kebijakan. Jual beli tanah di seputar lokasi IKN meningkat pesat.

Hanya orang bermodal yang mampu membeli. Masyarakat lokal tergiur dengan harga tanah yang tiba-tiba melambung. Kekuatan eksklusi terhadap masyarakat lokal dalam bentuk lain dipastikan akan menyusul.

3.3. IKN: Suatu Tantangan

Wacara IKN menunjukkan bahwa Kalimantan masih dinarasikan dan dikonstruksi sebagai daerah pemberi solusi atas persoalan di Jawa. Luar Jawa (Kaltim) sebagai penyedia lahan, penyedia naker murah, bukan penyedia SDM berkualitas. Dengan sudut pandang demikian rasanya lintasan yang dilalui tidak menuju ke tujuan mulia yang sudah ditetapkan.

Kajian-kajian awal telah dilakukan dan konsep IKN sudah dibuat, namun banyak persoalan-persoalan tidak sederhana yang muncul ke permukaan, yang menunjukkan kurang cukupnya pemahaman kondisi sosial masyarakat sekitar dan belum matangnya rancangan IKN. Tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mengurangi kekuatan eksklusi yang sedang terjadi.

4. KESIMPULAN

Program pembangunan IKN sampai saat ini mengindikasikan pengulangan model pembangunan Orba. Masyarakat setempat belum menjadi subyek/berperan sentral dalam proses yang dilakukan. Proses eksklusi terhadap masyarakat setempat terjadi kebijakan teritorialisasi dan pasar tanah.

REFERENSI

- Hall, D., Hirsch, P., Li, T.M. 2020. *Kuasa Eksklusi, Dilema Pertanahan di Asia Tenggara*. Yogyakarta; Insist Press.
- Hadiningrat, S.S. 2021. *Materi rapat dengar pendapat dengan Pansus UU IKN*. Aspirasi Rakyat dalam Pemandangan IKN dari Jakarta ke Kalimantan. Diakses di <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211215-035551-6760.pdf>.
- Hidayat, A. R , 2021. *Pembangunan dan Ketimpangan: Pandangan Keadilan Sosial*. (Journal of Humanity and Social Justice, 3 (1), 145-149).
- Kementerian PPN/Bappenas. 2022. *Rencana Induk IKN dalam Lampiran UU IKN*. Diakses di <https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-paparans/March2022/c9IVSaQqMGEtSQKMiVvt.pdf>.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2021. *Naskah Akademik RUU tentang IKN*. Diakses di <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/ikn/202106Bappenas-NaskahAkademikRUUIKN.pdf>.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2021. *Buku Saku IKN*. <https://ikn.go.id/storage/buku-saku-ikn-072121.pdf>.
- Li, T.M., 2012. *The Will to Improve. Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Margin Kiri
- Li, T.M. 2002. *Keterpinggiran, Kekuasaan, dan Produksi: Analisis terhadap Transformasi Daerah Pedalaman. Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. Jakarta: YOI

Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022
Balikpapan, 1-3 Juni 2022

Zakaria, Y. 2022. *Nasib Wilayah Penguasaan Masyarakat Pasca IKN.*
https://www.youtube.com/watch?v=II_fqZQkKlo.